



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN 2026

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengendalian anggaran belanja, perlu adanya standarisasi harga barang yang disesuaikan dengan harga pasar;
 - bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan standarisasi harga barang Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2026;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Standar Harga Barang adalah pedoman pembakuan barang menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan APBK Tahun 2026.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengendalian anggaran belanja.

BAB III STANDAR HARGA BARANG

Pasal 3

- (1) Standar harga barang Pemerintah Kabupaten Tahun 2026, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah batas tertinggi untuk harga setiap jenis barang, kecuali ditentukan lain oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Peraturan Bupati ini, yang dapat dijadikan pedoman dalam penetapan harga barang adalah daftar harga pasar, daftar harga yang dikeluarkan oleh pabrik, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur tentang standar harga barang pemerintah.
- (4) Dalam pelaksanaan pelelangan barang yang merupakan batas tertinggi adalah nilai keseluruhan barang yang dilelangkan berdasarkan perhitungan harga standar.
- (5) Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menggunakan harga pada saat akan dilaksanakan proses pengadaan barang dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) harga pasar.
- (6) Standar harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi oleh Tim Standarisasi Harga Barang Pemerintah Kabupaten.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja perangkat daerah/unit kerja didasarkan pada DPA perangkat daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang melakukan pengadaan barang dan melebihi standar harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan izin tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten, dengan melampirkan alasan dan nilai harga barang yang dimohonkan, paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pengadaan barang.

- (3) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Apabila terdapat kebijakan pemerintah yang menyebabkan harga barang tidak dapat dikendalikan dan/atau harga barang tersebut belum terdapat pengaturannya di dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat digunakan harga pasar yang berlaku dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) harga pasar.
- (5) Harga dasar barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini adalah harga sebelum diperhitungkan inflasi, *overhead*, infak dan pajak pertambahan nilai.
- (6) Harga satuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini adalah harga dasar setelah diperhitungkan inflasi, *overhead*, infak dan pajak pertambahan nilai.
- (7) Daftar harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dapat ditambahkan dengan biaya lainnya yang dibutuhkan sejauh dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti yang sah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 20 Juni 2025 M
24 Dzulkhijah 1446 H

BUPATI ACEH TIMUR,



ISKANDAR USMAN AL FARLAKY

Diundangkan di Idi
pada tanggal 20 Juni 2025 M
24 Dzulkhijah 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,



ADLINSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 22